ABSTRAK

A.Ismail Majenung. Relasi Kuasa Pemerintah Dan Komunitas Adat Barambang Bonto Katute Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Kabupaten Sinjai. Dibimbing oleh: Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP,.M.Si. Nursaleh Hartaman, S. IP,.M. IP

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan pemerintah, pemerintah desa, tokoh adat, serta anggota komunitas adat. Analisis penelitian menggunakan perspektif Michel Foucault yang mencakup *power/knowledge, discourse, governmentality,* serta resistensi dan negosiasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kuasa antara pemerintah dan komunitas adat tidak hanya berlangsung melalui kewenangan formal, tetapi juga melalui pengetahuan, wacana, dan mekanisme pemerintahan. Pemerintah menggunakan pengetahuan administratif dan legalitas formal dalam menentukan status serta pengakuan masyarakat adat, sedangkan komunitas memiliki pengetahuan yang bersumber dari sejarah, nilai adat, pengalaman, dan praktik pengelolaan hutan yang diwariskan secara turun-temurun. Pada aspek wacana, terdapat perbedaan pemaknaan antara pemerintah yang menekankan legalitas formal dan masyarakat yang menekankan hubungan historis serta kultural dengan wilayah dan hutan. *Governmentality* terlihat melalui mekanisme pengakuan, verifikasi, pemetaan, penetapan status, regulasi, dan pengawasan yang mengatur posisi serta ruang masyarakat dalam pengelolaan hutan. Sementara itu, masyarakat menunjukkan ruang resistensi dan negosiasi melalui upaya mempertahankan aturan adat, pengetahuan lokal, identitas, serta komunikasi dengan pemerintah. Dengan demikian, relasi kuasa dalam pengelolaan Hutan Adat Barambang Bonto Katute bersifat dinamis karena berlangsung melalui proses pengaturan, pemaknaan, penyesuaian, resistensi, dan negosiasi antara pemerintah dan komunitas adat.

Kata kunci: Relasi Kuasa, pemerintah, Masyarakat Adat, Hutan Adat, Governmentality.